HISTORISITAS DAN SUMBER DALIL UŞUL FIQH SHI’AH

Aspandi
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
Email: aspandimukardi@gmail.com

Abstract

In the history of the development of Islamic law, the existence of fiqh is one of the sciences that has given birth to a variety of methodologies in Islamic legal studies. Broadly speaking, the existence of fiqh proposals can be represented by the presence of Sunni and Shi'a fiqh proposals. As a theological group in Islam, Shi'ah has a different concept of fiqh from Sunni. This research is descriptive in nature, providing an explanation of the history of the development of shia fiqh, law in the perspective of shia, the propositions of shia fikh, and Istinbat in the perspective of shia. The conclusions from this study, that the Shi'a fiqh proposal is divided into two groups, namely Akhbariyyun and Uşuliyyun. In the process of determining the law, the Akhbariyyun group returned the matter to the Qur'an and Sunnah based on the determination of their Imams. The Akhbariyyun group holds that only their imams have the authority of ijtiḥad to establish laws based on the Qur'an and Sunnah. As is known, scholars' Shi'ah call Dalil al-Qur'an, Sunnah, Ijma, and 'Aql as the proposition Ijtihadi. Thus it can be said that Uşul Shi'ah Akhbariyyun is; Al-Kitab, namely al-Qur'an, Sunnah and words, deeds, and taqrir of the Imam. The Uul Uşuliyyun group, namely; Al-Kitab, Sunnah, and the words, deeds, and taqrir of the Ulema and Ijtihad which in their terms are called the proposition 'Aql.

Keywords: *Historicity, Sources of Proof, Proposed Fiqh, Shi'ah*

Abstrak

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, keberadaan usul fiqh merupakan salah satu ilmu yang telah melahirkan beragam metodologi dalam studi hukum Islam. Secara garis besar keberadaan usul fiqh dapat diwakili dengan hadirnya usul fiqh Sunni dan Shi'ah. Sebagai kelompok teologi dalam Islam, Shi'ah memiliki konsep usul fiqh yang berbeda dengan Sunni. Penelitian ini bersifat deskriptif, memberikan penjelasan tentang sejarah perkembangan usul fikih shi'ah, hukum dalam perspektif shi'ah, dalil-dalil usul fikih shi'ah, dan Istinbat dalam perspektif shi'ah. Hasil kesimpulan dari penelitian ini, bahwa usul fiqh Shi'ah terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan Akhbariyyun dan Uşuliyyun. Dalam proses penentuan hukum, golongan Akhbariyyun mengembalikan permasalahan kepada al-Qur'ān dan Sunnah berdasarkan penetapan Imam-imam mereka. Golongan Akhbariyyun berpandangan, bahwa hanya para imam mereka yang mempunyai otoritas ijtiḥad untuk menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'ān dan Sunnah. Sebagaimana diketahui, ulama' Shi'ah menyebut Dalil al-Qur'ān, Sunnah, Ijma, serta 'Aql dengan sebutan dalil Ijtihadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Uşul Shi'ah Akhbariyyun ialah; Al-Kitab, yakni al-Qur'ān, Sunnah dan perkataan, perbuatan, serta taqrir Imam. Adapun Uşul golongan Uşuliyyun, ialah; Al-Kitab, Sunnah, dan perkataan, perbuatan, serta taqrir Ulama serta Ijtihad yang dalam istilah mereka disebut dalil 'Aql.

Kata kunci: *Historisitas, Sumber Dalil, Usul Fiqh, Shi'ah*

PENDAHULUAN

Sebagai kelompok teologi dalam Islam, Shi'ah mempunyai konsep dan gagasan usul fikih yang berbeda dengan Sunni. Shi'ah mempunyai pandangan yang bertentangan dengan konsep *uşul* Sunni secara paradoks. Shi'ah telah menjadikan seluruh perkataan

para Imam mereka sebagai dalil *shara'* dan mempunyai kedudukan setara dengan al-Qur'ān dan Sunnah. Ketetapan para Imam dianggap sebagai *hujjah*. Dogma Shi'ah meyakini bahwa para Imam memiliki pengetahuan sempurna tentang *shari'at*. Dengan demikian, para imam merupakan pemegang otoritatif sebagai penetap hukum. Para imam Shi'ah diyakini mempunyai kualitas moral dan intelektual yang dijamin oleh Allah SWT.

Pada dasarnya, Shi'ah mempunyai gagasan yang sama dengan Sunni terkait sumber-sumber hukum dalam Islam. Sebagaimana Sunni, secara umum Shi'ah mendasarkan hukum dalam *usuhnya* pada al-Qur'ān, Sunnah, Ijmā', dan *'Aql*. Namun demikian, Shi'ah mempunyai perbedaan pandangan tentang artikulasi *ijtihad* dan aplikasinya dalam menjawab problematika hukum. Dalam pandangan Shi'ah, ijtihad terkait erat dengan madhab, sehingga seorang *mujtahid* tidak boleh bertentangan dengan pendapat-pendapat madhabnya. Dalam artian, seorang mujtahid tidak boleh berijtihad dengan sesuatu yang bertentangan dengan perkataan-perkataan para Imam yang *shadiq*, para imam yang telah diyakini dan ditunjuk berdasarkan naş dan wasiat.

Shi'ah berpandangan bahwa, sesungguhnya hikmah *tashri'* pada dasarnya telah menghendaki adanya keterangan dan rahasia tentang keuniversalan dari hukum-hukum. Para imam mereka telah diyakini mempunyai kemampuan membuka rahasia dan hikmah tersebut, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Namun demikian, dalam Shi'ah sendiri terdapat perbedaan pandangan tentang konsep *uşul* fikih sebagai ilmu terkait *istinbat* hukum dan pengembangan aspek *tashri'*nya. Berdasarkan pemaparan tersebut, pembahasan dalam kajian ini akan difokuskan pada bagaimana sejarah perkembangan pembentukan *uşul* fikih Shi'ah, bagaimana Shi'ah mendasarkan konsep *uşulnya*, serta bagaimana epistemologi *uşul* fikih Shi'ah. Kajian *uşul* fikih menjadi signifikan, hal tersebut terkait, bahwa sebagai upaya mengatasi problematika hukum dalam Islam, dibutuhkan sebuah metodologi yang komprehensif dalam rangka menghadirkan Islam dalam setiap tempus dan locus yang berbeda.

SEJARAH PERKEMBANGAN UŞUL FIKIH SHI'AH

Dalam sejarah perkembangan usul fikih Shi’ah, ulama’ usul Shi’ah diklasifikasikan menjadi dua golongan yakni *Uṣuliyyun* dan *Akhbariyyun*.¹ Golongan *Uṣhuliyyun* merupakan golongan yang menetapkan hukum dengan jalan *istinbat*, *ijtihad* dan *i’ṁāl al-‘aql*. Golongan ini berpandangan bahwa untuk mengatasi problematika kehidupan yang kompleks, maka tidak cukup hanya berpedoman pada Akhbar saja, sehingga ijtihad merupakan suatu kebutuhan. Beberapa ulama Shi’ah yang diyakini sebagai pelopor ijtihad adalah Ahmad Al-Junaidi Al-Askari abad ke 3 H dan Muhammad Ibnu ‘Aqiel abad ke 4 H. Dalam sejarah perkembangannya, pada dasarnya sebelum abad ke 3 diyakini telah ada ulama yang telah mendahului kedua ulama tersebut, yakni Al-Hakam Ibnu Hisyam dan Yunus Ibnu Abdillah, yang keduanya hidup pada akhir abad ke 2 H. Mereka dianggap telah melakukan ijtihad, dengan mengklasifikasi nilai-nilai Akhbar. Namun demikian, kedua ulama tersebut tidak digolongkan sebagai ulama mujtahid, karena pada masa itu masih ada imam yang dianggap mempunyai otoritas dan hak sebagai penetap hukum.

Golongan kedua yakni *Akhbariyyun*, yang berpegang pada Akhbar riwayat dari para imam maksum.² Dalam proses penetapan hukum, golongan ini hanya berdasarkan pada Akhbar yang telah diriwayatkan oleh para imam mereka. Golongan ini meyakini dan menempatkan para imam sejajar dengan Sunnah. Mereka berpandangan bahwa seorang Imam memiliki pengetahuan sempurna tentang shari’at (al-Qur’ān dan Sunnah) yang diwariskan dari satu imam kepada imam lainnya. Ajaran otoritatif yang disampaikan oleh para imam diyakini sebagai satu-satunya pengetahuan yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka menetapkan kebenaran shari’at.³ Oleh karena itu, dalam segala aspek hukum, golongan ini menyerahkan kepada para imam sebagai penentu hukum, karena pendapat para imam, dianggap sebagai Sunnah atau Akhbar.

---

¹ Ali Ahmad Al-Salusi, *Atsar al-Imamah fi al-Fiqh al-Ja’fari wa Uṣuluḥu*, Qatar; Jami’ah Qatar, 1975, 139.

² Golongan Akhbariyyun diyakini berkembang pada abad ke 11, yang dipelopori oleh Al-Mirza Muhammad Amin Al-Istirabadi, golongan ini berkembang bermula dari para ulama’ Shi’ah yang dianggap berpaling dari Akhbar dan lebih mengedepankan *ijtihad al-‘aqli* dalam proses *istinbat*. Golongan Akbariyyun merupakan kelompok minoritas dalam usul Shi’ah, kelompok ini lebih banyak berkembang di daerah Bahrain dan merupakan kelompok minoritas disana. Ibid., 140.

³ Antony Black, *The History of Islamic Thought: From the Prophet to the Present*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001, 92.

Pada abad ke III H, diantara ulama Shi’ah yang dianggap ahli uşul ialah Abu Sahl Al-Naubahiti, penyusun kitab “*Al-Khusus wa Al-Umum* dan kitab *Ibthalul Qiyas*”. Selain itu, Muhammad Ibnu Junaid juga dianggap sebagai ahli uşul fikih Shi’ah, seorang ahli fikih perbandingan. Beberapa karya yang telah disusun ialah; “*Kasyfu Tanwier wa al-Iltibas fi Ibthalil Qiyas* dan *Al-Asybah wa Al-Nadharir*”. Selanjutnya, pada abad ke IV dan V Hijriyah, uşul fikih dikalangan Shi’ah berkembang pesat. Perkembangan tersebut disebabkan menghilangnya para Imam mereka. Shi’ah membutuhkan metode yang tepat dan baik untuk mengimplementasikan ijtihad, yang dalam pandangan mereka bahwa ijtihad tidak pernah tertutup. Hal ini menjadi sandaran, sehingga para ulama Shi’ah menyusun karya-karya mereka dalam bidang fikih dan uşul. Diantara ulama tersebut ialah; Al-Sayyid Al-Syarif Al-Murtadla, penyusun kitab *Al-Dzari’ah fi Ilmi Usul Al-Shari’ah*, yang merupakan keturunan Musa Al-Kadzim.

Adapun pada abad ke V Hijriyah, Ulama Shi’ah yang dianggap sebagai pioneer dalam bidang fikih dan uşul ialah; Abu Ja’far Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Al-Thusiy, wafat pada tahun 466 H. Diantara karyanya ialah kitab *Al-‘Uddatu Al-Usul*, didalamnya menerangkan metode-metode Ulama’ Shi’ah dalam menetapkan hukum. Disamping itu, pada abad ini juga muncul seorang ulama yaitu Muhammad Ibnu Ali AL-Razi, penyusun kitab *Al-Masadir Uşul Al-Fiqh* dan *Al-Tanqih ‘An Al-Tahsin wa Al-Taqbih*. Sesudah abad ke VI Hijriyah, beberapa ulama Shi’ah seperti Alamah Jamaluddin Hasan Ibnu Yusuf Ibnu Ali Al-Mudhairi, hidup pada abad ke VIII hijriyah, telah menyusun beberapa karya diantaranya; *Al-Nihayah*, *Al-Mabadi*, dan *Syarh Ghayah Al-Wusul fi Ilmi Uşul*.

Sebagai disiplin ilmu, golongan Shi’ah meyakini bahwa penyusun ilmu uşul fikih pertama adalah Muhammad Al-Baqir. Adapun kitab uşul fikih pertama dikalangan Shi’ah ialah; “*Al-Alfadh Wama Fih*” yang disusun oleh Hisyam Ibnu Hakam dan kitab “*Ikhtilaful Hadits*” disusun oleh Yunus Abdur Rahman, yang didalamnya memuat masalah *ta’arudl* dua Hadits dan masalah *ta’diel* serta *tarjih*. Keyakinan Shi’ah tersebut berbeda dengan para Ahli uşul pada umumnya, yang menyatakan bahwa penyusun Ilmu uşul fikih, sebagai disiplin ilmu adalah Imam As-Syafi’i. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Abu Zahrah, bahwa Muhammad Al-Baqir merupakan penyusun pertama

Uşul Shi’ah, akan tetapi ia bukan penyusun pertama Ilmu uşul fikih. Abu Zahrah menilai bahwa penyusun pertama Ilmu uşul fikih ialah Imam As-Syafi’i.⁴

HUKUM DALAM PERSPEKTIF SHI’AH

Mengetahui hukum syar’i merupakan perkara fundamental, sebagai wujud untuk menjalankan ajaran Islam secara kaffah. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan Al-Ghazali, bahwa mengetahui dan memahami hukum Islam merupakan objek kajian ilmu fikih dan uşul.⁵ Diantara objek kajian uşul fikih adalah epistemologi tentang hukum, dalil dan *istinbati*. Dalam hal ini, Ulama uşul Shi’ah mempunyai gagasan yang berbeda, dengan ahli uşul lainnya tentang makna hukum. Shi’ah mendefinisikan hukum dengan;

الحكم هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان

*“Hukum ialah penetapan Shari’at yang datang dari Allah Ta’ala untuk mengatur hidup manusia”.*⁶

Definisi tersebut sangat luas jangkauannya, karena menyangkut aspek hidup manusia baik *ruhani* dan *jasmani*. Berbeda dengan uşul Sunni yang mendefinisikan hukum lebih spesifik. Ulama uşul Sunni mendefinisikan hukum sebagaimana berikut;

الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعاً.

*“Hukum adalah Firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf, berupa tuntutan kebolehan memilih atau ketentuan hukum”.*⁷

Berdasarkan definisi hukum tersebut, ditinjau dari pengetahuan Mukallaf dan ikhtiyarnya, Shi’ah mengklasifikasi hukum menjadi dua macam yaitu; Hukum *Waqi’i* dan Hukum *Dhahiri*. Ulama Shi’ah mendeskripsikan hukum *Waqi’e* sebagai hukum yang dijadikan bagi sesuatu berdasarkan kenyataan. Shi’ah membagi hukum ini menjadi dua bagian yaitu; kejadian pertama dan kejadian kedua. Kejadian pertama ialah kejadian yang tanpa memperhatikan apa yang akan datang, yang akan merubahnya, seperti kebolehan minum air. Adapun kejadian kedua ialah dengan memperhatikan sesuatu yang akan datang, yang akan merubah hukum yang pertama, seperti wajibnya minum air jika didasarkan pada tujuan minum tersebut untuk menyelamatkan hidup peminum air

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, 13.

⁵ Ibid., 26.

⁶ Muhammad Baqr al-Sadr, *Durus fi ‘Ilm al-‘Uşul*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1987, 64.

⁷ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm al-Uşūl Fiqh*, Beirut: Dār al-Qalam, 1978, 100.

tersebut. Sesuatu yang akan datang tersebut adalah tujuan menyelamatkan hidup dengan minum air, yang mengandung ketentuan perubahan hukum pertama yaitu *ibahah* menjadi hukum kedua yaitu *Wujub*. Sedangkan hukum *Dhahiri* yaitu penetapan hukum tersebut dikala tidak diketahui kenyataan hukum yang ada, seperti hukum kesucian tempat karena tidak diketahui kenajisan tempat tersebut.

Adapun hukum dari jenisnya, Shi’ah membagi hukum menjadi tiga macam yaitu; (1) Hukum *Taklifi*, yang terdiri dari *al-Wujub*, *al-Nadb*, *al-Hurmah*, dan *al-Karahah*; (2) Hukum *Tahyiri*; dan (3) Hukum *Wadh’i* yang terdiri dari *al-Sabab*, *al-Syarath*, dan *al-Mani’*. Klasifikasi Shi’ah tersebut hampir sama dengan pembagian jumhur ahli uşul Sunni, namun ada perbedaan diantara keduanya, jumhur ahli uşul Sunni mengklasifikasi hukum menjadi dua yakni hukum taklifi dan hukum wadh’i. Adapun hukum takhyiri, ahli uşul Sunni memasukkannya kedalam kategori hukum taklifi. Klasifikasi Shi’ah dengan memisahkan hukum takhyiri dianggap lebih rasional, hal tersebut sesuai dengan definisi taklifi yang bermakna membebani, adapun takhyiri artinya pilihan dan tidak membebani. Pandangan tersebut sebagaimana Hasbi tidak memasukkan hukum takhyiri pada hukum taklifi, akan tetapi menempatkan tersendiri.⁸ Perbedaan lain antara ahli uşul Sunni dan Shi’ah ialah pada perkembangan perincian hukum wadh’i. Ahli uşul Sunni menambahkan empat hukum pada hukum wadh’i sehingga menjadi tujuh hukum. Tiga hukum diantaranya sebagaimana klasifikasi Shi’ah yakni; *al-Sabab*, *al-Syarath*, dan *al-Mani’*, dan empat tambahan dari ahli uşul Sunni yakni; *al-Ibthal*, *al-Tashih*, *al-‘Azimah*, dan *al-Rukhsah*.⁹

DALIL-DALIL UŞUL FIKIH SHI’AH

Shi’ah mengklasifikasi dalil hukum Islam menjadi dua macam yakni; Dalil *Ijtihadi* dan Dalil *Faqqahiy*. Dalil *Ijtihadi* merupakan dalil yang menjadi sumber hukum *Dhahiri* yang terdiri dari; *al-Kitab*, *Sunnah*, *Ijma’* dan *al-‘Aql*. Adapun Dalil *Faqqahiy* ialah dalil yang menjadi sumber hukum *waqie’i* yang terdiri dari *Istishhab*, *Bara’ah*, *Ihtiyath*, dan *Tahyir*. Klasifikasi dalil tersebut dikemukakan oleh jumhur ulama uşul

---

⁸ Hasbi As-Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1957, 35.

⁹ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm al-Uşūl Fiqh*, 117.

Shi’ah atau *Uṣuliyyun*. Hal tersebut berbeda dengan golongan *Akhbariyyun*, yang hanya mengakui dalil hanya terdiri dari al-Qur’ān, dan Sunnah saja.

Secara umum, Shi’ah mempunyai gagasan yang sama dengan Sunni terkait sumber yang dijadikan dalil usul fikih. Sebagaimana Sunni, Shi’ah menempatkan empat sumber utama dalam usul fikihnya yakni; al-Qur’ān, Sunnah, Ijma’, dan Ijtihad. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam Shi’ah mengenai *al-‘aql* dijadikan sebagai sumber dalil dalam menetapkan hukum. Golongan *Uṣuliyyun* menempatkan *al-‘aql* sebagai dalil dan sumber hukum setelah al-Qur’ān, Sunnah, dan Ijma’. Adapun golongan *Akhbariyyun* menolak *al-‘aql* dijadikan sebagai dalil dan sumber hukum.

SUMBER HUKUM PERTAMA; AL-QUR’ĀN

Shi’ah menempatkan al-Qur’ān sebagai sumber hukum pertama dalam usulnya. Namun dalam menggali hukum dari al-Qur’ān, Shi’ah berpandangan bahwa tidak selalu harus memperhatikan makna tekstualnya, akan tetapi juga harus memperhatikan makna kontekstualnya. Untuk mendapatkan makna tersebut, Shi’ah mengharuskan adanya *marja’* yaitu para imam ma’sum atau *naib al-Imam*.¹⁰ Dalam dogma Shi’ah, bahwasanya para imam mempunyai kedudukan dan keistimewaan sebagaimana Nabi Saw, baik dalam hal *ma’sum*, sifat dan keilmuannya. Oleh karena itu, Shi’ah memandang para imam sebagai *al-Qur’ān an-Nātiq* (al-Qur’ān yang berbicara), sementara al-Qur’ān yang berupa teks dalam mushaf, mereka menyebut sebagai *al-Qur’ān al-Ṣāmit* (al-Qur’ān yang diam).¹¹ Kandungan dalam *al-Qur’ān al-Ṣāmit* hanya bersifat garis besar (*ijmali*), sehingga membutuhkan penjelasan yang tegas dan terperinci (*tafsili*). Dalam pandangan Shi’ah, orang yang memiliki otoritas memberikan penjelasan tersebut adalah para imam yang maksum. Dengan demikian, apa yang disebutkan oleh para imam maksum, dianggap tidak mungkin bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur’ān. Dengan kata lain, bahwa para imam diyakini telah mendapat petunjuk langsung dari Allāh, karena ketakwaan, kemaksuman dan keilmuan mereka sebagai pewaris Nabi Saw.

Dalam pandangan Shi’ah, bahwasanya al-Qur’ān mempunyai makna *Dhahir* dan *Batin*. Manusia biasa hanya dapat mengetahui makna yang dhahir saja. Sedangkan

---

¹⁰ Muhammad Husein Thabathaba’i, *Islam Shi’ah: Asal Usul dan Perkembangannya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989, 109.

¹¹ Ali Ahmad Al-Salusi, *Atsar Al-Imamah fi al-Fiqh al-Ja’fari wa Uṣuluḥu*, 139.

makna batin, hanya para imam maksum yang dapat mengetahuinya. Oleh karena itu, Shi’ah membagi pemahaman al-Qur’ān pada empat tingkatan, yaitu; (1) Fahmul Ibarah yakni pemahaman oleh orang awam, (2) Fahmul Isyarah ialah pemahaman oleh para ulama yang mendalami ilmu, (3) Fahmul Lathaifil Ibarah yaitu pembahasan oleh para wali, dan (4) Fahmul Haqaiq yakni pemahaman terhadap apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah dan hanya dapat dicapai oleh para Imam.

SUMBER HUKUM KEDUA; SUNNAH

Sunnah ditempatkan oleh Shi’ah sebagai sumber utama yang kedua setelah al-Qur’ān. Sunnah dalam pandangan Shi’ah meliputi ucapan, tindakan, dan pembenaran Nabi Saw dan para imam maksum.¹² Pandangan tersebut bertentangan dengan golongan Sunni, yang menisbatkan Sunnah hanya kepada Nabi Saw.¹³ Dengan demikian, pemahaman Sunnah dalam Shi’ah tidak hanya dinisbatkan kepada Nabi Saw, akan tetapi juga termasuk di dalamnya ucapan, tindakan dan pembenaran para imam yang maksum.¹⁴ Kedudukan para imam maksum adalah sebagai pewaris Nabi Saw dalam menyampaikan risalah Tuhan. Mereka tidak pernah bersalah dalam menyampaikan ajaran Islam.¹⁵ Oleh karena itu, segala sesuatu yang berasal dari para imam dianggap sama kedudukannya dengan yang berasal dari Nabi Saw.¹⁶ Dengan tetap memandang bahwa kesempurnaan para imam mereka berada di bawah posisi kesempurnaan Nabi Saw dan di atas kesempurnaan manusia biasa.¹⁷

---

¹² Ali Ahmad Al-Salusi, *Atsar Al-Imamah fi al-Fiqh al-Ja’fari wa Uṣuluḥu*, 274.

¹³ Lihat, ‘Abdurrahmān al-Sharbinī, *Ḥāshiyah al-‘Allāmah al-Bannānī ‘alā Matn Jam’ al- Jawāmi’*, juz II, Indonesia: Maktabah Dār Iḥyā’ al-Kutb al-‘Arabīyyah, t.th., 94; ‘Abd al-Ḥamīd Ḥakīm, *al-Bayān*, Jakarta: Maktabah al-Sa’dīyyah, t.th., 140; ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm al-Uṣūl Fiqh*, 36.

¹⁴ Pengertian Sunnah yang dikemukakan Shi’ah tersebut memiliki landasan teologis yang mereka yakini, baik dalam al-Qur’an maupun Hadits Nabi. Ayat al-Qur’an yang digunakan dasar adalah QS. al-Ahzab (33): 33 yang artinya: “*Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai Ahl al-Bayt, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*”. Sedangkan hadis Nabi yang dijadikan dasar oleh mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zayd ibn Arqam, yang artinya: “*Aku tinggalkan setelah kepergianku dua hal yang berharga yang kepadanya kalian merujuk, dan Allah melarangmu jika tidak merujuk kepadanya: (yakni) Kitab Allah dan Ahlu al-Bayt-ku*”. Lihat Ayatullah Baqir ash-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993, 144.

¹⁵ Muhammad Husein Thabathaba’i, *Islam Shi’ah: Asal Usul dan Perkembangannya*, 212.

¹⁶ Muhammad Al-Mudzaḥfar, *Aqāid al-Imamiyah*, Bayrut: Dār al-Safwah, 1992, 93.

¹⁷ Muhammad Husain al-Kashif al-Gita, *Aṣlu al-Shi’ah wa Uṣūluḥā*, Bairut: Muassasah al-‘alami lil Matbu’āt, 1993, 62.

Dalam golongan Shi’ah terdapat perbedaan pandangan tentang Akhbar sebagai landasan hukum. Sebagaimana para ahli usul Sunni, golongan *Uṣuliyyun* menerima klasifikasi Akhbar kedalam Ṣahih, Hasan dan Ḍa’if. Dalam pandangan mereka, untuk menentukan Ṣahih, Hasan, dan Ḍa’if, maka dibutuhkan ijtihad. Dalam hal ni, golongan *Uṣuliyyun* menolak Akhbar Ḍa’if sebagai dasar dalam istinbat hukum. Berbeda dengan golongan *Uṣuliyyun*, golongan *Akhbariyyun* hanya mengakui dan menetapkan hukum berdasarkan Akhbar yang termaktub dalam *al-kutub al-arba’ah*,¹⁸ yang menjadi pegangan pokok dan sumber rujukan, serta diyakini keabsahannya. golongan *Akhbariyyun* menolak klasifikasi nilai Akhbar. Golongan ini tidak membedakan antara Ahbar Ṣahih, Hasan, dan Ḍa’if. Golongan *Akhbariyyun* menolak rasionalitas dalam hukum. Dalam pandangan mereka, semua Akhbar dapat diterima sebagai dasar hukum tanpa harus melalui ijtihad kesahihan. Karena itu dalam doktrinnya, seluruh Akhbar yang terdapat dalam empat kitab mu’tabar di kalangan Shi’ah harus diterima secara keseluruhan.¹⁹ Namun demikian, Shi’ah sangat berhati-hati dalam menerima suatu Akhbar, hal tersebut dikarena tidak mungkin para imam mereka yang maksum mengatakan sesuatu yang menyalahi teks al-Qur’ān dan Hadits Nabi Saw yang ṣahih. Kemungkinan akan adanya pendustaan dan pemalsuan terhadap para imam mereka, ternyata jauh sebelumnya sudah diprediksikan oleh Imam Ja’far Sadiq ketika beliau berwasiat kepada murid-muridnya.²⁰

Secara garis besar, Shi’ah membagi Ahbar berdasarkan sanadnya menjadi dua macam yaitu; *Akhbar Mutawatir* dan *Akhbar Ahad*.²¹ *Akhbar Mutawatir* merupakan Akhbar yang disertai qarinah dan diyakini datangnya dari para imam maksum. Akhbar ini disepakati oleh para ulama usul Shi’ah dapat dijadikan hujjah dari segi sanad. Adapun *Akhbar Ahad* ialah Akhbar yang tidak mencapai derajat yang menyampaikan pada

---

¹⁸ Empat kitab yang menjadi pegangan golongan *Akhbariyyun*, yakni; (1) *Al-Kafi* yang disusun oleh Abu Ja’far Ibnu Ishaq bin Ya’qub Al-Kulainy, wafat pada 328 H; (2) *Man Layahdhuru Al-Faqih*, disusun oleh Abu Ja’far Ibnu Ishaq Ibnu Muhammad Ibnu Ali Husein Al-Hasan Al-Qummiy, wafat pada tahun 381 H; (3) *Al-Tahdzib* dan ; (4) *Al-Istibshar*, keduanya disusun oleh Abu Ja’far Muhammad Ibnu Ali Al-Thusiy, wafat pada tahun 460 H. Golongan ini berpandangan bahwa sanad yang terdapat pada empat kitab tersebut dipandang Ṣahih, oleh karena itu, golongan ini tidak mengklasifikasi nilai Akhbar kedalam Ṣahih, Hasan dan Ḍa’if. Lihat, Murtadha Muthahhari, *Prinsip-prinsip Ijtihad antara Sunnah dan Shi’ah*, terj. Fauzi Siregar dan Ahmad Rifa’i Hasan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, 30.

¹⁹ Ibid., 30.

²⁰ Hasyim Ma’ruf al-Hasani, *Sirah al-A’immah Ithna ‘Ashar*, Beirut: Dār al-Ta’āruf, 1990, 250.

²¹ Ali Ahmad Al-Salusi, *Atsar Al-Imamah fi al-Fiqh al-Ja’fari wa Uṣuluḥu*, 276.

tingkat meyakinkan datangnya dari para imam maksum. Akhbar ini terbagi menjadi dua macam diantaranya; (1) *Musnad*, yaitu Akhbar yang sanadnya meliputi semua nama-nama perawi yang terdiri dari para imam maksum, dan (2) *Mursal*, ialah Akhbar yang sanadnya tidak mencakup semua nama-nama perawi imam maksum.

Berdasarkan sanadnya, Shi'ah mengklasifikasi Akhbar Musnad kedalam dua macam yaitu; *Pertama, Mu'tabar*, ialah semua Akhbar musnad yang dapat dipercaya dan datang dari imam maksum. Akhbar Mu'tabar tersebut terbagi menjadi empat macam dan dapat dijadikan hujjah dalam pandangan mereka, diantaranya (1) *Sahih*, yaitu Akhbar yang semua perawinya merupakan ulama-ulama Shi'ah yang adil, (2) *Muwatsaq* ialah Akhbar yang para perawinya terdiri dari ulama-ulama tsiqah dari kaum Muslimin, atau sebagian terdiri dari para ulama Shi'ah yang adil, dan atau sebagian kaum Muslimin lain yang adil, (3) *Hasan*, yaitu Akhbar yang semua perawinya tergolong orang-orang yang terpuji dikalangan Rijalul Hadits, dan (4) *Da'if* yakni Akhbar yang ditunjang dengan amal fuqaha, Akhbar ini sebagian perawinya tidak tsiqah, akan tetapi sebagian Haditsnya diamalkan oleh para ulama.²² Dari keempat klasifikasi kedudukan Akhbar tersebut, Shi'ah menempatkan Akhbar Sahih sebagai hujjah pertama, hal tersebut dikarenakan Akhbar Sahih dapat diterima oleh seluruh kalangan ulama usul. Adapun klasifikasi berikutnya, Muwatsaq, Hasan, dan Da'if, menempati kedudukan kedua sebagai hujjah, hal tersebut karena hanya sebagian besar ulama usul yang menggunakannya. *Kedua, Akhbar Ghairu Mu'tabar* yakni Akhbar musnad, akan tetapi tidak dapat meyakinkan berasal dari para imam maksum. Selai itu, Shi'ah mengklasifikasi *Akhbar Mursal* kedalam dua bagian yaitu; (a) mursalnya orang tsiqah, yakni apa yang disandarkan kepada para imam maksum, oleh ahli rijalul hadits dengan rasa yakin (tentram) menerima hadits tersebut, karena mengetahui bahwa perawi tidak meriwayatkan kecuali dari orang yang tsiqah. Hadist ini dapat dijadikan Hujjah dalam pandangan Shi'ah. (b) mursalnya orang yang tidak tsiqah, yaitu apa yang disandarkan kepada para imam maksum oleh seorang perawi yang tidak dikenal bagaimana meriwayatkannya. Hadits ini dalam pandangan Shi'ah tidak dapat dijadikan hujjah.

SUMBER HUKUM KETIGA; IJMĀ'

---

²² Ali Ahmad Al-Salusi, *Atsar Al-Imamah fi al-Fiqh al-Ja'fari wa Uṣuluḥu*, 277-282.

Sebagai sumber hukum ketiga, Shi'ah menetapkan Ijmā', sebagaimana para ahli-ahli fikih dan ahli-ahli hadits mereka dalam masa sahabat dan tabi'-tabi'in yang menyebut perkataan Ijmā'. Dalam pandangan Shi'ah, Ijmā' berarti kesepakatan dengan suara bulat dari ulama Shi'ah atas suatu persoalan. Pandangan tersebut bertentangan dengan para ahli usul lainnya, yang mendefinisikan Ijmā' sebagai kesepakatan mayoritas umat Muslim.²³ Shi'ah menisbatkan Ijmā' kepada para imam mereka, bukan pada dzat Ijmā'. Dengan demikian, kesepakatan baik, sedikit ataupun banyak dari para imam Shi'ah termasuk Ijmā' dan merupakan *hujjah* bagi mereka.²⁴

Ijmā' Shi'ah ialah ijmā' yang disepakati oleh para imam atas sesuatu hukum. Dalam hal ini, Ijmā' tidak lain sifatnya adalah sebagai penjelasan dari kedua sumber hukum utama yaitu al-Qur'ān dan Sunnah. Pada dasarnya, dalam menetapkan hukum, Shi'ah tidak berpegang selain kepada al-Qur'ān dan Sunnah. Hal tersebut sesuai dengan pandangan mereka, bahwa agama merupakan peraturan yang ditetapkan Tuhan, sehingga tidak boleh ditambah dengan peraturan yang ditetapkan oleh manusia. Kendati menjadi sumber hukum ketiga, Shi'ah tidak menganggap Ijmā' memiliki kekuatan hukum yang mandiri. Ijmā' tidak dianggap sebagai *hujjah* secara mandiri. Ijmā' akan dipandang sebagai *hujjah* manakala ia memberikan penjelasan suatu hadits. Dengan demikian, Ijmā' merupakan manifestasi Sunnah yang secara riwayat tidak ditemukan, yang pada dasarnya terdapat pada riwayat yang lainnya. Selain itu, Ijmā' yang dapat diterima hanyalah Ijmā' yang terjadi dalam periode Nabi Saw atau periode para imam. Jika ada kesepakatan yang terjadi di kalangan ulama pada masa sekarang, maka tidak dapat dianggap sebagai Ijmā'.²⁵ Dalam artian, pada dasarnya yang menjadi sandaran Ijmā' Shi'ah ialah pendapat para imam mereka dan bukan persetujuan para ulama. Dalam pandangan Shi'ah, kesepakatan ulama tanpa persetujuan imam maksum, maka Ijmā' tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah*. Hal tersebut dikarenakan para ulama usul Shi'ah mensyaratkan adanya imam maksum dalam kesepakatan Ijmā'.

---

²³ Ali Ahmad Al-Salusi, *Atsar Al-Imamah fi al-Fiqh al-Ja'fari wa Uşuluhi*, 362.

²⁴ Hasan bin Yusuf bin Ali bin al-Mutahhir al-Hulli, *Tahdhib al-Wuṣul ila 'Ilmi al-Uşul*, Teheran: Dar al-Khilafah, 1308 H, 70.

²⁵ Ayatullah Baqir ash-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, 146.

Para ulama usul Shi’ah mengklasifikasi Ijmā’ kedalam dua macam. *Pertama*, Ijmā’ *Muhassal*, yaitu setiap Ijmā’ yang dihasilkan oleh *al-Faqih* sendiri, yang kemudian diikuti oleh perkataan para mufti. *Kedua*, Ijmā’ *Manqul*, yani Ijmā’ yang tidak didapatkan oleh *al-Faqih* sendiri, akan tetapi didapati dari penukilan pendapat para fuqaha lain, sehingga merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang sama.²⁶ Klasifikasi tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pembagian ahli usul Sunni, yang membagi Ijmā’ kedalam Ijmā’ Sarih dan Ijmā’ Sukuti, sebagaimana yang telah kita ketahui.

SUMBER HUKUM KEEMPAT; ‘AQL

Shi’ah menjadikan ‘*Aql* sebagai sumber hukum yang keempat. Akal dinilai sebagai dalil hukum syar’i manakala tidak ditemukan dalil dari al-Qur’ān, Sunnah dan Ijmā’. Shi’ah mendefinisikan hukum ‘*Aql* dengan setiap ketentuan akal yang menyampaikan kepada hukum syara’. Ketentuan tersebut dapat diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu; *pertama*, ketentuan ‘*aql* yang berdiri sendiri, seperti ketentuan akal bahwa yang dipandang baik menurut akal dipandang baik pula oleh syara’, maka hal yang dipandang baik menurut akal dipandang sebagai hukum syara’, seperti Adil yang dipandang baik menurut akal dan syara’, maka adil dipandang sebagai hukum syara’. Kedua, ketentuan ‘*aql* yang tidak sepenuhnya berdiri sendiri, seperti melakukan ibadah haji adalah wajib menurut syara’. Terlaksananya wajib ibadah Haji jika seseorang pergi ke Makkah dalam rangka melaksanakan wajib haji tersebut. Dengan demikian, pergi ke Makkah tersebut menjadi wajib menurut syara’. Pandangan hukum tersebut dalam perspektif Shi’ah dikategorikan sebagai Ijtihad, baik Ijtihad dalam memahami dan mengimplementasikan hukum dari nas maupun Ijtihad bil ra’yi.

Shi’ah menempatkan ‘*aql* sebagai dalil untuk menetapkan hukum yang cukup dengan pemahaman logika. Dalam hal ini, dalil akal dibangun atas dasar *tahsin* dan *taqbiḥ al-‘aqliyyin*, dengan asumsi dasar bahwasanya sesuatu memiliki sifat dasar *hasan dzati*, dan *qabih dzati*. Kedua sifat tersebut dapat dipahami oleh akal secara langsung, tanpa memerlukan ijtihad. Sebagaimana hukum wajib menolak madharat dan

---

²⁶ Ali Ahmad Al-Salusi, *Atsar Al-Imamah fi al-Fiqh al-Ja’fari wa Uṣuluḥu*, 363.

mendatangkan maslahat, serta *‘iqab* merupakan sesuatu yang *qabih*, hal-hal tersebut tidak membutuhkan penjelasan dalil.²⁷

Akal mempunyai kedudukan sebagai sarana untuk memahami hukum-hukum tertentu, yang dasarnya telah tersirat dalam al-Qur’ān dan Sunnah. Ulama usul Shi’ah memandang akal dan shari’at tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam pandangan mereka, bahwa hukum perkara sesuatu yang ditetapkan oleh akal, pada dasarnya juga telah ditetapkan oleh naṣ. Pandangan demikian sesuai dengan prinsip teologi Shi’ah, bahwa *hasan* dan *qabih* dapat diketahui oleh akal, sekalipun tanpa penjelasan al-Qur’ān dan Sunnah. Oleh karena itu, jika seseorang telah mengetahui yang baik, maka wajib baginya melaksanakannya. Demikian pula, bila seseorang telah mengetahui yang buruk, maka ia wajib pula menjauhinya tanpa harus menunggu penjelasan dari shari’at.²⁸ Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara Shi’ah dan Sunni, baik tentang furū’ agama dalam bidang ibadah maupun mu’amalah.²⁹

Adapun Qiyas sebagai sumber hukum, Shi’ah mempunyai pandangan yang bertentangan dengan Sunni. Shi’ah menolak Qiyas sebagai dalil dan sumber hukum. Pandangan Shi’ah tersebut didasarkan pada alasan bahwa pembuat hukum (*al-Shāri*) agama hanyalah Allāh, adapun *al-Shāri* dalam qiyas adalah manusia. Selain itu, Shi’ah menolak pandangan yang mengatakan bahwa qiyas sudah ada di masa Nabi Saw dan diperbolehkan menggunakannya.³⁰ Penolakan Shi’ah terhadap qiyas juga didasarkan

---

²⁷ Ali Ahmad Al-Salusi, *Atsar Al-Imamah fi al-Fiqh al-Ja’fari wa Uṣuluḥu*, 367.

²⁸ Muhammad Baqir al-Sadr, *Durūs fi ‘Ilmi al-Uṣūl*, 193.

²⁹ Hal ini dapat di lihat dalam kitab perbandingan lima mazhab yang berjudul *al-Fiqh ‘alā Madhāhib al-Khamsah*, karya Muhammad Jawwad Mughniyah.

³⁰ Shi’ah ucapan dari Ali ibn Abu Talib. Ia berkata: ”*Jika diperkenankan menggunakan qiyās, maka dalam perkara air dalam salat bagi musafir, mestinya yang lebih dipentingkan menyapu kaki dari pada menyapu luar sepatu*”. Selain itu, Shi’ah juga mendasarkan pada beberapa riwayat dan kasus yang terjadi di masa sahabat, dan juga ucapan Ibn Mas’ud yang menolak qiyas dengan perkataan: “*Jika anda menggunakan qiyas dalam agamamu, niscaya kamu akan banyak menghalalkan dari pada apa yang telah diharamkan Allāh.*” Juga mereka kemukakan perkataan Shu’bi yang berbunyi; “*Apabila engkau ditanya tentang suatu masalah, maka janganlah engkau menggunakan qiyas dengan membanding-bandingkan persoalan, karena engkau akan banyak menghalalkan yang haram, dan banyak mengharamkan yang halal, sedangkan engkau akan ibnasa, jika engkau meninggalkan sunah Rasul dan sahabat, demi untuk menggunakan ukuran qiyas atau membandingkan masalah dalam agama.*” Adapun penetapan Nabi kepada Mu’adz bukanlah alasan adanya qiyās, tetapi alasan untuk menggunakan akal dalam menjelaskan al-Qur’ān dan Sunnah. Karena menggunakan akal diwajibkan bagi seorang *qadi* dan *mufti* dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan menjelaskan perkara yang halal dan haram.

pada hadits mutawatir yang diriwayatkan dari para imam mereka, “Apabila qiyas menjadi sumber hukum, maka agama akan rusak”.³¹

ISTINBAT DALAM PERSPEKTIF SHI'AH

Secara umum, Shi'ah menggunakan *istinbat* sebagai metode dalam penetapan hukum. Istinbat Shi'ah didasarkan pada kaidah-kaidah umum untuk menentukan furu', bukan mempertahankan furu'. Hal ini dapat dikatakan bahwa metode Shi'ah dalam menetapkan kaidah usul, digolongkan pada metode Mutakallimin. Disamping itu, sebagian ulama Shi'ah ada yang menyusun usul berdasarkan furu'. Dengan demikian, usul Shi'ah dapat dikatakan, sebagian menggunakan metode dan menempuh jalan Syafi'iyah dan jalan Hanafiyah. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan penyusunan usul Shi'ah selanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Shi'ah membagi usul menjadi dua macam yaitu; usul Lafdiah dan usul 'Amaliyah. Usul Lafdiah yaitu usul yang titik beratnya mengkaji tentang petunjuk lafad yang dhanni dalalahnya pada makna yang terkandung dalam lafad tersebut, seperti lafad amr, nahi, 'aam, khas, Mutlaq dan muqayyad, mantuq, dan mafhum, hubungannya dengan hukum yang dicari dari dalil-dalil baik al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan usul 'Amaliyah yaitu, usul yang pembahasannya dititik beratkan pada usaha para fuqaha dalam menerapkan dasar hukum yang tidak ada nasnya. Usul ini terbagi menjadi dua bagian yaitu; (1) usul Syar'iyah seperti menetapkan dasar ibadah dan hukum berdasar istishab, (2) usul 'Aqliyah, seperti penetapan ihtiyat dan takhyir.

Untuk menetapkan sebuah hukum, ulama usul Shi'ah mengkaji petunjuk lafad pada makna yang terkandung dalam sebuah matan (teks). Dalam ahl ini, shi'ah mengklasifikasi petunjuk lafad kedalam dua bagian. Pertama, Nas, yaitu lafad yang menunjukkan pada makna satu saja (tetap). Makna tersebut tidak dapat ditarik pada makna yang lain. Dalam memahami nas, maka tidak diperlukan sebuah dalil (penguat). Hal tersebut dikarenakan bahwa nas tersebut telah menunjukkan maknanya, karena lafad nas tersebut secara qat'i telah menunjukkan makna secara pasti. Kedua, Dahir, yaitu lafad yang menunjukan pada makna lebih dari satu (komplek), akan tetapi petunjuk pada salah satu makna lebih kuat dari pada makna yang lainnya. Shi'ah menggunakan

---

³¹ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al-Shi'ah fi al-Mizān*, Bayrut: Dār al-Jawwād, 1989, 81.

beberapa metode dalam menetapkan hukum dari mana lafad Dahir diantaranya; (a) berpendirian pada yang kuat, bahwa mana itulah yang dimaksud dari lafad dahir. Hal ini didasarkan pada kaidah bahwa “*Kullu Dahir Hujjatun*”, tiap-tiap yang dahir itu dapat diterima sebagai hujjah, (b) bahwa tidak ada yang mencegah untuk mengambil makna dan beramal dengan arti yang sesuai, (c) berdasarkan arti dahir lafad tersebut, yang ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para ahli usul mereka, yang meliputi Amar, Nahi, Mantuq dan Mafhum, ‘Aam dan Khas, serta lafad Mutlaq dan Muqayyad.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan tersebut diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa Shi’ah dalam menetapkan hukum, menggunakan ijtihad dengan proses *istinbati*. Dalam proses penentuan hukum, golongan *Akhbariyyun* mengembalikan permasalahan kepada al-Qur’ān dan Sunnah. Dalam hal ini, pengertian Akhbar meliputi perkataan, perbuatan, dan penetapan Imam-imam mereka. Golongan *Akhbariyyun* berpandangan, bahwa hanya para imam mereka yang mempunyai otoritas ijtihad untuk menetapkan hukum berdasarkan al-Qur’ān dan Sunnah. Sebagaimana diketahui, ulama’ Shi’ah menyebut Dalil al-Qur’ān, Sunnah, Ijma, serta ‘Aql dengan sebutan dalil Ijtihadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Uşul Shi’ah *Akhbariyyun* ialah; Al-Kitab, yakni al-Qur’ān, Sunnah dan perkataan, perbuatan, serta taqrir Imam. Adapun Uşul golongan *Uşuliyyun*, ialah; Al-Kitab, Sunnah, dan perkataan, perbuatan, serta taqrir Ulama serta Ijtihad yang dalam istilah mereka disebut dalil ‘Aql.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm al-Uşūl Fiqh*, Beirut: Dār al-Qalam, 1978.
- ‘Abd al-Ḥamīd Ḥakīm, *al-Bayān*, Jakarta: Maktabah al-Sa’diyyah, t.th.
- Ali Ahmad Al-Salusi, *Atsar al-Imamah fī al-Fiqh al-Ja’fari wa Uşuluḥu*, Qatar; Jami’ah Qatar, 1975
- ‘Abdurrahmān al-Sharbinī, *Ḥāshiyah al-‘Allāmah al-Bannānī ‘alā Matn Jam’ al-Jawāmi’*, juz II, Indonesia: Maktabah Dār Ihya’ al-Kutb al-‘Arabiyyah, t.th.

- Antony Black, *The History of Islamic Thought: From the Prophet to the Present*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001.
- Ayatullah Baqir ash-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Hasbi As-Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1957.
- Hasan bin Yusuf bin Ali bin al-Mutahhir al-Hulli, *Tahdhib al-Wuṣul ila ‘Ilmi al-Uṣul*, Teheran: Dar al-Khilafah, 1308 H.
- Hasyim Ma’ruf al-Hasani, *Sīrah al-A’immah Ithna ‘Ashar*, Beirut: Dār al-Ta’āruf, 1990.
- Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Muhammad Baqr al-Sadr, *Durus fī ‘Ilm al-‘Uṣul*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1987.
- Muhammad Al-Mudzaḥfar, *Aqā'id al-Imamiyah*, Bayrut: Dār al-Safwah, 1992.
- Muhammad Husain al-Kashif al-Gita, *Aṣlu al-Shī’ah wa Uṣūluhā*, Bairut: Muassasah al-a’lami lil Matbu’ât, 1993.
- Muhammad Husein Thabathaba’i, *Islam Shi’ah: Asal Usul dan Perkembangannya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al-Shī’ah fī al-Mīzān*, Bayrut: Dār al-Jawwād, 1989.
- Murtadha Muthahhari, *Prinsip-prinsip Ijtihad antara Sunnah dan Shi’ah*, terj. Fauzi Siregar dan Ahmad Rifa’i Hasan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.